INFORMASI PUBLIK:
Hak Anda untuk tahu!
www.komisiinformasi.bantenprov.go.id

KLIPING KORAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Media/Koran : Kabar Banten
Hari/Tanggal : Senin, 25 Juli 2016
Halaman Koran : 3

Sengketa Informasi Biro Umum

Bisa Pengaruhi Pemeringkatan KIP

SERANG, (KB).-

Langkah kasasi yang ditempuh Biro Umum Setda Banten atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang yang menolak keberatan sengketa informasi dengan pemohon Haerudin dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan badan publik dalam konteks keterbukaan informasi publik (KIP).

Menurut Ketua Divisi Pelayanan Publik Pattiro Banten, Ahmad Subhan, sengketa informasi tersebut akan berpengaruh terhadap posisi Banten dalam pemeringkatan KIP secara nasional. "Jelas ini akan sangat berpengaruh terhadap pemeringkatan keterbukaan informasi publik di Provinsi Banten. Karena, dengan kasus ini bisa digambarkan, bahwa badan publik di Pemprov Banten belum sepenuhnya pro terhadap keterbukaan informasi yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP," katanya, Ahad (24/7/2016).

Ia menyayangkan, sikap pihak biro umum yang terkesan keukeuh menganggap, bahwa informasi yang diminta pemohon, yaitu dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) merupakan informasi yang dikecualikan. "Sangat disayangkan jika masih ada badan publik di Banten yang bersikeras, bahwa DPA adalah dokumen rahasia," ujarnya.

Ia menuturkan, beberapa organisasi kemasyarakatan pernah melakukan hal yang sama, yaitu memintaan informasi publik tentang DPA. Pada 2013 di Provinsi Lampung sampai masuk dalam penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Lampung, bahkan sampai Mahkamah Agung (MA). "Putusannya, bahwa DPA adalah dokumen yang terbuka. Badan publik harus patuh dan taat terhadap putusan pihak MA tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran nomor 224K/TUN/2013," ucapnya.

IST

Ahmad Subhan

Artinya, kata dia, jika sudah ada putusan di Komisi Informasi manapun, bahkan pihak MA yang menyatakan, bahwa DPA adalah dokumen yang harus terbuka ke publik.

Terpisah, Kepala Biro Umum Setda Banten, Sitti Maa'ani Nina menolak jika dikatakan kasus sengketa informasi yang sedang bergulir tersebut berpengaruh terhadap pemeringkatan KIP Banten.

"Sebetulnya, tidak ada kaitannya dengan pemeringkatan, karena yang kami laksanakan adalah mengikuti mekanisme sengketa informasi sampai mendapatkan hasil yang final. Jadi, harus dibedakan. Mau naik mau turun enggak ada kaitan ya, karena sudah ada tolok ukurnya," tuturnya melalui pesan singkatnya, kemarin.

Nina mengatakan, saat ini pihaknya melalui pihak biro hukum sedang menyiapkan memori kasasi.

"Kami sedang siapkan memori kasasi," katanya. **(H-42)*****